Pontianak Post • Minggu 21 Oktober 2012

BPK Serahkan Audit Hambalang ke DPR

JAKARTA-Teka-teki siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan anggaran kasus Hambalang akan segera terungkap. Dalam hitungan hari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil auditnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota VI BPK Rizal Djalil mengatakan, audit Hambalang sudah memasuki tahap akhir. Rencananya, Rabu pekan depan (24/10), pimpinan BPK akan menggelar Sidang Badan untuk menetapkan hasil audit. "Besoknya (Kamis, Red) sudah bisa diserahkan ke DPR," ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (20/10).

Dalam semua audit BPK, proses akhir pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui Sidang Badan yang diikuti oleh Sembilan pimpinan BPK. Rizal termasuk salah satu dari unsur pimpinan tersebut.

Bagaimana dengan kontroversi dugaan adanya intervensi dalam proses audit BPK? Terkait hal itu, Rizal enggan berkomentar. Menurut dia, materi hasil audit tidak boleh disampaikan sebelum audit tersebut diserahkan kepada DPR selaku pihak yang meminta BPK mengaudit Hambalang. "Sabar saja, tinggal beberapa hari lagi," katanya.

Namun, berdasar pernyataan Ketua BPK Hadi Poernomo, aroma korupsi memang memang menyengat dalam kasus Hambalang. "Saya tidak bisa katakan materi hasil auditnya. Tapi intinya, sejak dalam kandungan, Hambalang ini sudah sakit," ujarnya. Seperti diwartakan sebelumnya, muncul kontroversi dugaan intervensi terkait tidak dicantumkannya beberapa nama dalam lembar kesimpulan audit pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang Bogor. Selain Andi Mallarangeng, beberapa nama perusahaan juga tidak dicantumkan, seperti PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Sebagaimana diketahui, Athiyyah Laila yang juga istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tercatat sebagai komisaris PT Dutasari Citralaras.

Kasus Hambalang memang bertensi tinggi. Banyak nama pejabat di pemerintahan, partai, maupun DPR yang diduga masuk dalam pusaran kasus ini. Sebut saja Menpora Andi Mallarangeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin, politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh, hingga politisi PDIP I Wayan Koster.

Apakah terseretnya nama-nama petinggi itu yang membuat audit Hambalang menjadi lama sehingga sempat memunculkan suara-suara miring kepada BPK yang dinilai lamban? Rizal menampiknya. Menurut dia, proses audit memang harus dilakukan dengan cermat dan teliti serta hati-hati. Namun, dia tidak membantah bahwa Sidang Badan yang akan mengambil kesimpulan akhir audit pada Rabu mendatang, bisa saja alot. "Sekali lagi, semuanya akan tergantung pada jalannya Sidang Badan itu," jelasnya.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan penyelidikan dugaan aliran dana dari proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hingga saat ini KPK belum menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan. "Mengenai aliran dana masih dalam penyelidikan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi S.P kemarin. Penyelidikan yang tengah dilakukan oleh KPK, tidak bergantung pada temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit BPK memang bisa menjadi petunjuk dalam penyelidikan ataupun penyidikan di KPK. Namun, kasus Hambalang ini tidak bermula dari audit BPK. "Kasus Hambalang berasal dari pengaduan masyarakat," kata Johan.

KPK memang meminta BPK untuk menghitung kerugian negara dari proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut. "BPK bisa mengaudit kerugian negara berdasarkan permintaan dari penegak hukum," kata Johan. KPK meminta audit sejak penyidikan kasus ini dimulai Mei lalu. Hingga kini, KPK belum menerima audit lengkap dari Badan Pemeriksa. Sejak dimulainya penyelidikan kasus ini, KPK juga telah menerima data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Data aliran dana dari PPATK tersebut diduga terkait dengan proses penerbitan sertifikat tanah Hambalang. Selain itu, juga terkait dengan pengadaan proyek tersebut. KPK masih mendalami dokumen-dokumen tersebut. "Beberapa dokumen itu harus didalami," katanya.

Di kasus Hambalang, KPK baru menetapkan satu tersangka yakni Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedi Kusdinar. Dedi diduga berperan dalam pencairan anggaran Hambalang termin pertama sekitar Rp 200 miliar. Proyek Hambalang sendiri dianggarkan dengan mekanisme tahun jamak sejak 2010 hingga 2012. Total anggarannya sekitar Rp 2,5 triliun.. ***(owi/sof)***